



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

MINGGU, 16 SEPTEMBER 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Tunggakan Retribusi Kios Rp 2,4 Miliar

**Disperindag
Minta Dihapuskan**

BENGKULU, BE - Tunggakan retribusi sewa kios Pasar Panorama, Barukoto dan Pasar Minggu menimbulkan piutang yang cukup tinggi, yakni mencapai Rp 2,4 miliar yang terhitung hingga 31 Desember 2017.

Hal ini mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu, Teuku Zulkarnain SE.

Menurutnya, tidak ada kes-

eriusan dari dinas terkait untuk melakukan penagihan, sehingga piutang yang harusnya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut juga berbalik menjadi kerugian daerah.

"PAD inilah yang kita gunakan untuk pembangunan rumah sakit, sarana pra sarana publik, infrastruktur dan sebagainya. Oleh karena itu, dinas terkait harus menagih itu dengan serius," tegas Teuku, kemarin (15/9).

Ia menjelaskan, yang sering menjadi kendala dinas untuk

melakukan penagihan adalah akomodasi atau anggaran yang tidak memadai, baik untuk melakukan verifikasi data, serta pendataan dan operasional sehingga proses penagihan sulit dilakukan.

"DPRD sudah berkomitmen kalau ada persoalan minimnya dana untuk penagihan, ya kita siap anggarkan. Tapi eksekutif juga tidak pernah mengajukan itu, tahu-tahu jumlah piutang sudah sebesar ini," paparnya.

Pihaknya juga tidak bisa lang-

sung menyetujui jika eksekutif selalu mengajukan pemutihan atau penghapusan utang retribusi/pajak daerah, karena hal tersebut membuat OPD terkait menjadi malas melakukan penagihan dan akhirnya tinggal menunggu pemutihan saja tanpa ada upaya atau kerja keras dalam menagih piutang yang seharusnya menjadi PAD tersebut.

"Apakah upaya-upaya penagihan ini sudah maksimal atau belum, langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan.

Kalau tidak maksimal, kita jangan bicara penghapusan dulu, karena itu ada langkah terakhir," tegasnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota, Hj Dewi Dharma MSi mengungkapkan bahwa piutang tersebut sudah tercatat dari tahun 2012 hingga 2017 lalu, dan jumlah Rp 2,4 miliar tersebut bukanlah piutang berupa uang, tetapi media karcis retribusi yang tidak laku. **(805)**